

WIRAUSAHA

2023

PERDA KOTA SALATIGA NO.5, LD. 2023/NO. 5. TLD. NO. 5. HLD KOTA SALATIGA 22 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA

ABSTRAK

- bahwa pada hakekatnya pemuda memiliki potensi keterampilan dan kemandirian berusaha serta kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan daerah, sehingga pemuda memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga diperlukan pengembangan potensi berupa pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, yang diharapkan dapat menciptakan pemuda yang mandiri, maju, berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing, dan Pemerintah Daerah memiliki tugas, kewenangan dan tanggungjawab dalam menetapkan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan pengembangan potensi pemuda melalui pelayanan kepemudaan dengan memberikan fasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 25 Tahun 1992; PP No. 7 Tahun 2021

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda dengan menetapkan Batasan istilah, asas, tujuan dan ruang lingkup yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Fungsi, Karakteristik, Arah dan strategi Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Tugas Wewenang, dan Tanggung jawab Pemerintah Daerah, Peran, Tanggung jawab dan Hak Pemuda, Perencanaan, Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan pemuda, Koordinasi dan Kemitraan Kepemudaan, Prasarana dan Sarana Kepemudaan, Peran Serta Masyarakat, Pemberian Penghargaan, Pendanaan serta pembinaan dan pengawasan dalam Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda.

CATATAN

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Juli 2023
- Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Penjelasan: 7 halaman.